

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang umum dilakukan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan publik maupun kondisi sosial yang dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mendefinisikan unjuk rasa atau demonstrasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran secara lisan, tulisan, maupun bentuk demonstratif lainnya di muka umum, dan hak tersebut dijamin konstitusi melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Sejak era reformasi, demonstrasi berskala nasional terjadi hampir setiap tahun. Mulai dari Reformasi Dikorupsi pada 2019, penolakan Omnibus Law pada 2020, penolakan RKUHP pada 2022, hingga unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pilkada pada 2024, gelombang aksi terus berulang dari waktu ke waktu (Tempo, 2025). Tahun 2025 bahkan tercatat sebagai tahun dengan aksi massa terpadat dalam satu dekade, ditandai oleh aksi *Indonesia Gelap* (Reuters, 2025) dan penolakan revisi UU TNI (CNBC Indonesia, 2025). Puncaknya terjadi pada akhir Agustus 2025, ketika aksi yang meluas setelah meninggalnya pengemudi ojek daring Affan Kurniawan mencakup 107 titik di 32 provinsi dengan sedikitnya 10 korban jiwa (Liputan6, 2025; Tempo, 2025). Pola serupa berulang kembali pada 2026 melalui aksi *Heading to Bankrupt Indonesia* (Reuters, 2026).

Rangkaian aksi ini membawa dampak yang tidak sederhana. Di satu sisi, aksi kolektif berperan sebagai instrumen demokrasi yang mendorong perubahan sosial (Corcoran dkk., 2015; Jabbarli & Pfaff, 2023). Namun di sisi lain, ketika aksi bereskalasi menjadi kerusuhan, kerugian yang timbul tidaklah kecil. Kerugian material diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah di tingkat

daerah, hampir Rp900 miliar secara nasional, bahkan berpotensi menyentuh Rp8 hingga 9 triliun jika memperhitungkan kerugian sektor jasa, belum lagi ratusan korban luka yang menyertainya (KabarBursa, 2025; Kompas, 2025; Liputan6, 2025). Besarnya dampak ini menunjukkan bahwa keterlibatan individu dalam aksi kolektif bukan persoalan sederhana, sehingga memahami faktor psikologis yang mendorongnya menjadi kebutuhan yang mendesak.

Dalam kajian psikologi sosial, keikutsertaan dalam aktivitas seperti demonstrasi dipahami sebagai bentuk partisipasi dalam *collective action*, yaitu tindakan yang dilakukan individu sebagai bagian dari kelompok untuk memperjuangkan kepentingan bersama atau menentang kondisi yang dianggap tidak adil (van Zomeren dkk., 2008). Tilly (1981) memandang *collective action* sebagai situasi ketika sekelompok individu mengerahkan sumber daya bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Wright dkk. (1990) membedakannya menjadi dua bentuk, yaitu *normative action*, tindakan yang sesuai dengan norma sosial seperti menandatangani petisi, dan *non-normative action*, tindakan di luar norma sosial yang umum diterima seperti aksi protes ilegal (Tausch dkk., 2011). Demonstrasi secara definitif selalu bersifat kolektif karena melibatkan sekelompok orang, sehingga persoalan dalam penelitian ini bukan terletak pada status kolektif suatu aksi. Persoalan yang sebenarnya terletak pada variasi kesediaan individu untuk terlibat dalam *collective action* ke depan, yang dapat mencakup rentang tindakan dari yang normatif hingga non-normatif. Di antara sesama peserta aksi sekalipun, kesediaan ini ternyata tidak seragam. Ada yang berhenti setelah sekali ikut, ada yang terus terlibat dari aksi ke aksi, ada pula yang bersedia menempuh cara di luar norma. Motif keterlibatannya pun beragam, mulai dari keyakinan pribadi hingga sekadar ajakan teman atau solidaritas kelompok (Agostini & van Zomeren, 2021).

Populasi yang paling relevan untuk mengkaji variasi ini adalah individu yang pernah mengikuti aksi demonstrasi, karena jawaban mereka mengenai kesediaan beraksi berpijak pada pengalaman nyata, bukan sekadar perkiraan atas sesuatu yang belum pernah dialami. Kelompok yang paling sering berada di garis depan aksi tersebut adalah mahasiswa, yang secara psikologis berada pada tahap dewasa awal. Hurlock (1980, dalam Paputungan, 2023) menggambarkan masa ini

sebagai masa pengaturan hidup, masa produktif, serta masa yang penuh ketegangan emosi dan perubahan nilai. Ketegangan emosi yang tinggi membuat individu pada fase ini lebih peka dan lebih cepat bereaksi terhadap persoalan yang menyentuh kehidupannya, sementara nilai-nilai yang dipegangnya terus disesuaikan seiring meluasnya pengalaman dan hubungan sosial (Paputungan, 2023). Karakteristik inilah yang menjadikan mahasiswa kelompok yang relatif responsif terhadap dinamika sosial di sekitarnya.

Salah satu pendekatan teoritis yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan keterlibatan individu dalam *collective action* adalah *Social Identity Model of Collective Action* (SIMCA). Model ini menyebut tiga pendorong utama, yaitu identifikasi terhadap kelompok, efikasi kelompok, dan *perceived injustice* (van Zomeren dkk., 2008). Kekuatan model ini bukan sekadar klaim teoretis, melainkan didukung oleh sintesis meta-analitik terhadap 182 sampel independen dengan total lebih dari 38.000 partisipan, yang menunjukkan bahwa ketiga prediktor tersebut secara terpisah memiliki efek berukuran medium terhadap *collective action*, berkisar antara $r = .34$ hingga $.38$, dan tetap memberikan sumbangan yang unik ketika dikontrol bersama-sama. Identitas sosial dalam hal ini berfungsi sebagai jembatan konseptual yang menghubungkan *perceived injustice* dan efikasi (van Zomeren dkk., 2008). Di antara ketiga prediktor tersebut, *perceived injustice* menempati posisi yang khas sebagai pemicu awal yang menggerakkan proses psikologis menuju tindakan, sehingga variabel ini yang dipilih sebagai fokus utama penelitian ini untuk dikaji pengaruhnya terhadap *collective action*. *Perceived injustice* merupakan penilaian kognitif yang mencakup besarnya kerugian, kecenderungan menyalahkan pihak lain, perasaan diperlakukan tidak adil, dan perasaan bahwa kerugian tidak dapat diperbaiki (Sullivan dkk., 2008). Konstruk ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif *Belief in a Just World* dari Lerner (1980), yaitu keyakinan bahwa dunia pada dasarnya adil dan setiap orang memperoleh apa yang layak diterimanya. Ketika keyakinan itu terguncang oleh peristiwa yang bertentangan dengannya, muncullah persepsi ketidakadilan (Neumann dkk., 2021). Neumann dkk. (2021) selanjutnya merumuskan *perceived injustice* sebagai konstruk multidimensional yang mencakup pengalaman ketidakadilan, persepsi ketidakadilan, konsekuensi emosional-kognitif, serta respons individu terhadapnya.

Menariknya, tidak semua bentuk *perceived injustice* memiliki kekuatan yang sama dalam mendorong tindakan. Dimensi afektif dari *perceived injustice*, yang mencakup emosi seperti kemarahan dan *resentment* berbasis kelompok, terbukti memiliki kekuatan prediktif yang jauh lebih besar dibandingkan dimensi kognitifnya semata. Sintesis meta-analitik menunjukkan bahwa *affective injustice* menghasilkan effect size yang secara signifikan lebih kuat terhadap *collective action* ($r = .49$) dibandingkan *non-affective injustice* yang hanya melibatkan penilaian kognitif ($r = .34$) (van Zomeren dkk., 2008). Temuan ini mengindikasikan bahwa emosi berbasis kelompok berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan persepsi ketidakadilan dengan kecenderungan bertindak secara kolektif, sejalan dengan teori *intergroup emotion* yang menekankan peran *group-based anger* sebagai motivator utama aksi kolektif.

Proses dari persepsi ketidakadilan menuju kesediaan bertindak dapat dijelaskan secara bertahap. Titik awalnya adalah penilaian kognitif atas suatu peristiwa, yaitu individu menilai apakah kelompoknya diperlakukan secara tidak proporsional, apakah kerugian tersebut dapat dipersalahkan pada pihak tertentu, dan apakah kerugian itu dapat diperbaiki (Sullivan dkk., 2008). Ketika penilaian ini mengarah pada kesimpulan bahwa perlakuan tersebut melanggar prinsip keadilan, individu tidak berhenti pada tahap berpikir semata, melainkan mengalami *group-based anger*, yaitu kemarahan yang muncul bukan karena kerugian pribadi, melainkan karena kelompok yang menjadi bagian identitasnya diperlakukan tidak adil (van Zomeren dkk., 2008). Sebagai gambaran, mahasiswa yang menyaksikan rekan seperjuangannya menjadi korban tindakan represif cenderung memaknai peristiwa itu bukan sebagai insiden yang bersifat pribadi, melainkan sebagai bukti ketidakadilan struktural terhadap kelompok mahasiswa secara keseluruhan, sehingga kemarahan yang muncul pun bersifat kolektif, bukan sekadar kemarahan perorangan.

Kemarahan berbasis kelompok ini kemudian bekerja melalui dua jalur sekaligus, sebagaimana dijelaskan dalam *dual pathway model* (Tausch dkk., 2011). Jalur pertama adalah jalur emosional, yaitu kemarahan yang menghasilkan dorongan untuk bertindak guna meredakan ketegangan yang dirasakan akibat ketidakadilan. Jalur kedua adalah jalur efikasi, yaitu keyakinan bahwa tindakan

kolektif benar-benar mampu menghasilkan perubahan nyata. Kedua jalur ini bekerja berdampingan. Ketika kemarahan tinggi namun efikasi rendah, dorongan untuk bertindak dapat teralihkan menjadi rasa tidak berdaya, sedangkan kombinasi kemarahan dan efikasi yang sama-sama tinggi paling konsisten memprediksi keterlibatan yang sesungguhnya (Tausch dkk., 2011; van Zomeren dkk., 2004). Kuat-lemahnya identifikasi individu terhadap kelompoknya turut memperkuat proses ini, sebab semakin kuat seseorang mengidentifikasi diri dengan kelompok yang dirugikan, semakin besar pula kemungkinan kemarahannya diterjemahkan menjadi kesediaan bertindak, bukan justru diredam menjadi penarikan diri (Kelly & Breinlinger, 1995). Menariknya, mekanisme ini tidak seragam untuk setiap bentuk *collective action*. Kemarahan cenderung menjadi prediktor yang konsisten bagi tindakan normatif, sementara keterlibatan pada tindakan non-normatif justru lebih kuat diprediksi oleh emosi lain seperti *contempt* atau rasa bersalah (Cervone dkk., 2023; Tausch dkk., 2011). Hal ini menunjukkan bahwa jalur psikologis dari *perceived injustice* menuju *collective action* dapat berbeda-beda, bergantung pada bentuk tindakan yang dituju.

Berbagai temuan empiris turut mendukung keterkaitan ini secara konsisten. Renger dkk. (2020) menemukan bahwa individu yang berpegang kuat pada prinsip kesetaraan cenderung lebih terdorong untuk mengikuti aksi protes. Szolstakowski dan Besta (2023) menunjukkan bahwa penilaian terhadap ketidakadilan menjembatani hubungan antara persepsi ancaman kelompok dan kesediaan berpartisipasi. Studi lintas 29 negara oleh Corcoran dkk. (2015) juga menemukan bahwa persepsi ketidakadilan berhubungan positif dengan berbagai bentuk *collective action*, sementara van Zomeren dkk. (2004) menunjukkan melalui eksperimen bahwa kemarahan atas ketidakadilan mampu mendorong berbagai bentuk protes.

Meski demikian, hubungan antara *perceived injustice* dan *collective action* tidak bersifat otomatis, sebab tidak semua peserta aksi digerakkan oleh rasa ketidakadilan (Agostini & van Zomeren, 2021). Sejauh ini, sebagian besar pengujian atas hubungan kedua variabel ini, termasuk sintesis meta-analitik yang telah diuraikan, dilakukan di negara Barat dengan isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi, dan lingkungan. Pengujian pada konteks demonstrasi di

Indonesia masih sangat terbatas, padahal Indonesia tengah mengalami gelombang aksi yang masif, berulang, dan berdampak besar seperti telah diuraikan sebelumnya. Kesenjangan inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini, dengan mengkaji pengaruh *perceived injustice* terhadap *collective action* pada mahasiswa yang pernah mengikuti aksi demonstrasi.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Demonstrasi di Indonesia terjadi dengan frekuensi tinggi, berulang setiap tahun, berskala nasional, dan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang besar.
- 2) Kesiediaan untuk terlibat dalam tindakan kolektif bervariasi antarindividu, bahkan di antara orang-orang yang sama-sama pernah mengikuti aksi, baik dalam keberlanjutan maupun bentuk keterlibatannya.
- 3) *Perceived injustice* secara teoritis merupakan pemicu awal *collective action*, namun perannya dalam menjelaskan variasi kesiediaan beraksi pada peserta aksi di Indonesia belum banyak diuji.
- 4) Tidak semua keterlibatan dalam *collective action* didasari oleh *perceived injustice*, sehingga hubungan keduanya perlu dibuktikan secara empiris.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, peneliti membatasi penelitian ini pada pengaruh *perceived injustice* terhadap *collective action* demonstrasi pada mahasiswa yang pernah mengikuti aksi.

Intelligentia - Dignitas

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah apakah *perceived injustice* berpengaruh terhadap *collective action* demonstrasi pada mahasiswa.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *perceived injustice* terhadap *collective action* demonstrasi pada mahasiswa.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi kajian psikologi sosial, khususnya dalam memahami faktor psikologis yang menjelaskan variasi kesediaan individu untuk terlibat dalam *collective action*. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur mengenai hubungan *perceived injustice* dan *collective action* pada konteks Indonesia yang selama ini masih jarang diteliti.

1.6.2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan membantu memahami dorongan psikologis di balik keterlibatan dalam aksi demonstrasi, sehingga partisipasi dalam gerakan sosial dapat dijalani secara lebih sadar dan reflektif.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk mengkaji topik *collective action*, *perceived injustice*, maupun partisipasi sosial mahasiswa dalam konteks yang lebih luas.
- 3) Bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan membantu memahami mengapa mahasiswa memilih terlibat dalam aksi demonstrasi, sehingga partisipasi tersebut dapat dibaca sebagai bentuk kepedulian terhadap isu publik dan direspons dengan membuka ruang dialog, bukan semata-mata dengan penekanan.

Intelligentia - Dignitas